

KONSEP KEKUASAAN JAWA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK INDONESIA

Oleh : Joko Wicoyo

Alumni IKIP SADHAR Jurusan Bahasa Inggris th 1984

Alumni Fak. Filsafat UGM th 1986

Alumni Pasca Sarjana UGM Jurusan Ilmu Politik

I. PENDAHULUAN.

Studi perbandingan dalam ilmu-ilmu sosial telah mencoba mengkaji peranan budaya untuk memahami dan menerangkan tingkah laku yang berbeda dalam berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan dan politik. Lucien Pye, misalnya, berpendapat bahwa unsur budaya merupakan variable terpenting dan paling utama guna memahami perkembangan politik suatu bangsa, karena budaya politik suatu bangsa atau masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau bangsa tersebut. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa kehidupan bermasyarakat pada dasarnya selalu dipengaruhi oleh interaksi antara orientasi dan nilai-nilai. Interaksi tersebut memungkinkan timbulnya kontak langsung antara budaya suatu kelompok dengan budaya kelompok lainnya. Interaksi ini pula pada dasarnya merupakan suatu proses pembentukan atau pengembangan budaya politik bangsa. Proses inilah yang dikenal sebagai "sosialisasi politik", yaitu suatu proses di mana anggota masyarakat mengalami, menyerap, dan menghayati nilai-nilai politik yang ada disekitarnya.

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, berikut ini akan dibahas tentang konsep kekuasaan Jawa dalam kehidupan sosial politik Indonesia. Mengapa konsep kekuasaan Jawa? Karena dalam ilmu politik, "kekuasaan" dan gejala-gejala yang berkaitan dengannya sangat penting, karena kekuasaan menunjuk pada kegiatan, tingkah laku serta sikap dan keputusan-keputusan pelaku, kelompok, organisasi dan kolektivitas, yang dalam masyarakat yang sedang

berkembang seperti Indonesia, manifestasinya lebih nampak pada kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijaksanaan dalam pembangunan. Sedangkan mengapa "Jawa", karena didasarkan pada pertimbangan adanya asumsi yang mengatakan bahwa saat ini sistem politik Indonesia hampir sepenuhnya dipengaruhi oleh sistem politik dan kekuasaan tradisional Jawa. Asumsi tersebut kebetulan juga diperkuat oleh adanya fakta bahwa sebagian besar pusat pemerintahan di Indonesia berada di Pulau Jawa dan oleh karena itu selalu terdapat kecenderungan bagi suku-suku non Jawa untuk selalu mengadaptasikan diri dengan nilai-nilai Jawa sebagai basis persepsi politik mereka. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa jumlah masyarakat Jawa yang cenderung selalu mendominasi kehidupan politik dan roda pemerintahan baik dipusat maupun di daerah. Setidak-tidaknya dari konteks pelaksanaan pembangunan sekarang ini yang selalu berorientasi ke pusat dan adanya budaya "mohon petunjuk" sebelum suatu program dilaksanakan telah sedikit banyak membuktikan bahwa sistem politik dan kekuasaan tradisional Jawa telah merasuki sistem politik Pemerintahan Orde Baru.

II. KONSEP KEKUASAAN MENURUT BUDAYA JAWA

Menurut Benedict R. O. G. Anderson dalam tulisannya yang berjudul "The Idea of Power in Javanese Cosmology" konsep kekuasaan menurut budaya Jawa ada empat. Pertama, kekuasaan itu kongkrit, artinya kekuasaan itu memang ada dan keberadaannya tersebut karena diturunkan oleh Hyang Murbeng Dumadi (Tuhan Yang Maha Esa) atas dasar wahyu kepada "wakilnya" di dunia. Jika dikaitkan dengan kehidupan politik, kekuasaan menurut faham Jawa tersebut merupakan ungkapan "kasekten" (sakti) yang didasarkan atas "wahyu". Maka walaupun penuh misteri, akan tetapi kekuasaan itu konkrit adanya. Hal ini sangat berbeda dengan konsep politik Barat yang mengatakan bahwa kekuasaan itu abstrak, artinya kekuasaan itu adalah hasil abstraksi dari rumusan pola-pola interaksi sosial tertentu yang kebetulan sedang diamati. Jadi kekuasaan itu ada jika seseorang atau kelompok tersebut dapat menunjukkan adanya hubungan

sebab akibat antara seseorang atau kelompok tersebut dengan orang lain atau kelompok lain dengan bukti bahwa seseorang atau kelompok orang tersebut patuh kepada kemauan orang atau kelompok orang lain.

Kedua, kekuasaan itu homogen, artinya semua kekuasaan sama jenisnya dan sama sumbernya. Kekuasaan di tangan satu orang atau kelompok identik dengan kekuasaan yang ada ditangan individu atau kelompok lain di manapun berada. Hal ini berbeda dengan konsep kekuasaan teori Barat yang memandang bahwa sumber kekuasaan itu heterogen dan kekuasaan merupakan hasil analisa dari pola-pola hubungan sosial tertentu. Dengan demikian teori Barat membedakan berbagai sumber kekuasaan. Ada kekuasaan yang bersumber pada kekayaan, status sosial, senjata, kepandaian, jumlah penduduk dan masih banyak lagi tergantung pada sejauh mana intensitas hubungan antar seseorang atau kelompok.

Ketiga, jumlah kekuasaan dalam alam semesta selalu tetap. Menurut faham orang Jawa, kekuasaan merupakan ungkapan realitas yang sama, berasal dari sumber tunggal yang sama, berkualitas sama dan kekuasaan itu lebih dulu ada daripada yang lain, termasuk terhadap pengertian baik dan buruk. Faham ini pada dasarnya bertolak dari anggapan bahwa hakekat alam semesta itu tetap, tidak bertambah luas atau bertambah rumit. Yang berubah menurut perputarannya hanyalah konstelasi dan tata letaknya saja. Dalam politik praktis, konsekuensi dari faham ini adalah adanya konsentrasi kekuasaan pada suatu tempat, yang dengan sendirinya mengharuskan pengurangan kekuasaan dalam jumlah yang sama di tempat lain. Dominasi eksekutif terhadap lembaga lainnya dan rasionalisasi dari tindakan penyerdehanaan jumlah parpol serta perwujudan azas tunggal pada masa Orde Baru boleh dikatakan merupakan perwujudan dari konsep kekuasaan faham tradisional Jawa. Hal ini berbeda dengan teori Barat yang menganggap bahwa kekuasaan itu secara inheren sifatnya tidak terbatas. Di samping sumber kekuasaan itu bermacam-macam, maka secara teoritis akumulasi kekuasaan tidak ada batasnya. Dengan kata lain, jumlah seluruh kekuasaan yang ada di dunia sekarang ini jauh lebih besar dibanding dengan limapuluh tahun yang

lalu. Hal ini disebabkan karena ditemukannya teknologi yang semakin canggih, sehingga jumlah kekuasaan terus bertambah dari hari kehari. Dalam konteks ini, konsep kekuasaan ditentukan dan dipengaruhi oleh laju perkembangan teknologi modern.

Keempat, kekuasaan itu tidak mempersoalkan keabsahan. Karena semua kekuasaan itu berasal dari sumber yang tunggal yang homogen, maka kekuasaan tidak mempersoalkan darimana kekuasaan itu berasal. Menurut cara fikir orang Jawa, menuntut hak berkuasa berdasarkan sumber-sumber kekuasaan yang berbeda-beda tidak akan ada artinya. Dalam hal ini tidak berlaku ungkapan yang mengatakan bahwa kekuasaan berdasarkan kekayaan adalah sah sedangkan kekuasaan yang berdasarkan senjata tidak sah. Kekuasaan menurut cara berpikir orang Jawa tidak mengenal sah maupun tidak sah, yang penting kekuasaan itu senantiasa ada dan kongkrit.

III. Faham Kekuasaan Jawa Dalam Kehidupan Sosial Politik Indonesia.

Berbeda dengan konsep politik Barat, masalah pokok yang ditimbulkan oleh konsepsi mengenai kekuasaan Jawa bukanlah masalah bagaimana menggunakan kekuasaan, melainkan bagaimana menghimpun atau memusatkan ataupun mengumpulkan kekuasaan. Dengan terkumpulnya atau terpusatnya kekuasaan akan dapat menimbulkan kekuatan yang luar biasa pada diri seseorang atau penguasa. Menurut tradisi Jawa usaha menghimpun kekuasaan dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara antara lain: melalui bertapa (asketisme), memelihara orang-orang aneh (palawija) dan melakukan persahabatan atau persekutuan dengan kekuatan supernatural (gaib). Tidak mengherankan jika pada waktu penobatan Sri Sultan Hamengku Buwono X pada hari Selasa Wage 7 Maret 1989, begitu juga pada saat penobatan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII tahun 1921 maupun penobatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX tahun 1947, nampak barisan orang-orang aneh (barisan polowijo) berbaris mengelilingi upacara penobatan di Siti Hinggil. Pengikut sertaan barisan polowijo dalam upacara penobatan tersebut diyakini sebagai salah satu cara pemusatan kekuasaan dari berbagai sumber kekuasaan sehingga menam-

bah kekuatan, karena diyakini bahwa kraton merupakan sebagai pusat kekuasaan. Dengan berkumpulnya barisan polowijo (orang bule, kerdil, bongkok, ahli nujum, tukang okeh/bercerita dan tukang tari) maupun benda-benda seperti keris, tombak, alat-alat suci, Kereta Kencana bersama penguasa di Kraton, maka kekuasaan yang dimiliki oleh benda-benda maupun orang-orang tersebut diserap dan menambah kekuatan si pemegang kekuasaan. Demikian juga sewaktu Sri Sultan Hamengku Buwono X melakukan pawai keliling Kraton dengan naik kereta Garudayekso, sehari setelah penobatan, bersanding tanpa sang permaisuri, hal ini dimaksudkan sebagai cara untuk memberikan kesempatan kepada Ratu Kidul untuk bersanding bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kejadian ini diyakini sebagai cara untuk memberikan kesempatan kepada Ratu Kidul untuk bersanding bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X, karena diceritakan bahwa dalam kisah berdirinya Kerajaan Mataram, Sutawijaya, sebelum mendirikan kerajaan di hutan Mentaok terlebih dulu melakukan persahabatan dengan pusat Kerajaan "Segoro Kidul". Setelah berhasil memperoleh "palilah" (ijin) Ratu Kidul barulah pendirian kerajaan tersebut dimulai, dan hal ini dilakukan secara turun temurun.

Pemusatan faham kekuasaan menurut faham budaya Jawa ini juga dilakukan oleh Presiden Soekarno.

bah kekuatan, karena diyakini bahwa kraton merupakan sebagai pusat kekuasaan. Dengan berkumpulnya barisan polowijo (orang bule, kerdil, bongkok, ahli mujum, tukang okeh/bercerita dan tukang tari) maupun benda-benda seperti keris, tombak, alat-alat suci, kereta kencana bersama penguasa di Kraton, maka kekuasaan yang dimiliki oleh benda-benda maupun orang-orang tersebut diserap dan menambah kekuatan si pemegang kekuasaan. Demikian juga sewaktu Sri Sultan Hamengku Buwono X melakukan pawai keliling Kraton dengan naik kereta Garudayekso, sehari setelah penobatan, bersanding tanpa sang permaisuri, hal ini dimaksudkan sebagai cara untuk memberikan kesempatan kepada Ratu Kidul untuk bersanding bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kejadian ini diyakini sebagai cara untuk memberikan kesempatan kepada Ratu Kidul untuk bersanding bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X, karena diceritakan bahwa dalam kisah berdirinya Kerajaan Mataram, Sutawijaya, sebelum mendirikan kerajaan di hutan Mentaok terlebih dulu melakukan persahabatan dengan pusat Kerajaan "Segoro Kidul". Setelah berhasil memperoleh "palilah" (ijin) Ratu Kidul barulah pendirian kerajaan tersebut dimulai, dan hal ini dilakukan secara turun temurun.

Pemusatan faham kekuasaan menurut faham budaya Jawa ini juga dilakukan oleh Presiden Soekarno. Dalam upacara-upacara kenegaraan yang diselenggarakan di Istana Negara, Presiden Soekarno sering mengadakan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk yang lakon-lakonnya dipilih secara khusus disesuaikan dengan situasi politik pada waktu itu agar dapat mengilhami konsepsi perjuangan bangsanya. Di samping mengadakan pertunjukan wayang kulit, sewaktu menghadapi Belanda dalam perebutan Irian Barat, Bung Karno tidak segan-segan memanggil berbagai kelompok spiritual dan mistik untuk ikut serta mendukung kampanye politiknya. Semuanya bertujuan untuk menghimpun kekuatan yang ada di luar dirinya. Hal ini menurut tradisi Jawa, Bung Karno secara sadar melakukan kegiatan untuk mengumpulkan kekuasaannya. Banyak aspek khas tingkah laku politik Bung Karno yang memperlihatkan usahanya untuk menyerap berbagai sumber kekuasaan, seperti mengadakan rapat raksasa, pawai akbar, pidato yang

berapi-api dengan menyebut-nyebut revolusi dan kata-kata lain yang penuh dengan nilai dan semangat kepahlawanan dan bahkan menyebut dirinya sebagai "Penyambung Lidah Rakyat". "Pemimpin Besar Revolusi" dan "Putra sang Pajar". Kesemuanya itu, di samping sebagai cara untuk menyampaikan pesan kepada rakyat, ada tujuan lain secara mistik yaitu untuk menghimpun dan memperlihatkan kekuasaannya agar ribuan rakyatnya paatuh kepadanya dengan sukarela. Semakin besar jumlah kelompok politik yang berbeda-beda atau bahkan para musuh atau kelompok yang berlawanan yang dapat diserap ke dalam rapat raksasa, semakin besar pula kekuasaan yang diperoleh oleh Bung Karno. Cara berpidato beliau yang berapi-api dan mengikat seolah-olah merupakan mantra yang diucapkan guna menambah kehebatan kekuasaannya.

Hal lain yang sering dianggap arang lain sebagai slogan yang tidak bertanggungjawab dan secara intelektual tidak mempunyai konsistensi adalah pemikiran Bung Karno tentang NASAKOM. Dalam pemikiran ini, orang tidak dapat menafsirkan bahwa konsep Soekarno tentang NASAKOM hanyalah sebagai alat untuk berkompromi saja, melainkan jauh dari itu. NASAKOM merupakan salah satu pernyataan Bung Karno bahwa penguasa memiliki kekuasaan yang diserap dari berbagai kekuatan yang berbeda, dan Bung Karno menyerap kesemuanya itu ke dalam dirinya dan melakukan penaklukan secara sinkretis.

Kekuasaan tersebut, menurut faham budaya Jawa, bukanlah semata-mata ditentukan oleh kemampuan memusatkan kekuasaan belaka, akan tetapi ditandai pula oleh adanya "wahyu". "Wahyu" oleh orang Jawa sering digambarkan seperti bola yang bercahaya, bergelap berwarna biru, hijau atau putih yang melintas melalui langit pada malam hari. Gerak "Wahyu" secara khas merupakan jatuhnya suatu dinasti dan berpindahkannya kekuasaan kepada dinasti lain.

Dalam kehidupan politik Indonesia modern, pengejawantahan dari konsepsi wahyu ini berlaku pada waktu menjelang jatuhnya Presiden Sukarno akibat peristiwa 30 S PKI tahun 1965. Jendral Suharto berdasarkan penuturan banyak orang dan terutama setelah terungkapnya kasus Sawito dalam

pembelaannya, telah melakukan "tapa brata" (bertapa) dalam rangka memperoleh kekuasaan dari Presiden Sukarno. Terlepas dari persoalan benar tidaknya cerita tersebut ternyata setelah Soeharto dapat melakukan "tapa brata" dengan baik, maka ia berhasil memperoleh kekuasaan atau "wahyu" yang berwujud Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR) yang dalam tradisi politik Jawa dapat disejajarkan dengan "Jamus Kalimasada" pusaka andalam para Pandawa.

Implikasi politik dari kisah tersebut, menunjukkan bahwa Jendral Soeharto dalam perspektif kebudayaan Jawa telah memperoleh wahyu yang membenarkan dirinya untuk menggantikan penguasa lama dan membentuk pusat kekuasaan baru (ORDE BARU). Cara-cara yang dipergunakan oleh Soeharto dalam menghimpun kekuasaan yang tercerai-berai pada saat itu hampir mirip dengan kisah masuknya Prabu Parto ke dalam roh Arjuna dalam cerita wayang. Sebagai Arjuna, Soeharto telah berhasil menghancurkan dan menyerap kekuatan musuh (Soekarno dan pendukungnya) ke dalam dirinya. Menurut Fachry Ali (Refleksi faham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern, 1986), mengapa jendral Soeharto menolak tuntutan-tuntutan kelompok radikal militer yang ingin menghancurkan seluruh kekuatan lawan dibawah pimpinan HR Dharsono dan kawan-kawan serta tetap membiarkan kekuatan musuhnya hidup, merupakan cara untuk menghimpun semua kekuatan musuh yang terpencar, sebagai potensi kekuatan yang harus diserap ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu betapapun dekatnya hubungan Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan Soekarno, ia tetap dibirkkan hidup yang kemudian diubah menjadi kekuatan yang mendukung Soeharto dan Orde Baru. Kebijakan yang sama juga dilakukan terhadap Masyumi. Rehabilitasi Masyumi dilarang, namun dimunculkan kekuatan baru yang berasal dari sumber yang sama, yaitu Parmusi dengan orientasi baru yang mendukung Orde Baru. Begitu juga PSI walaupun banyak tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan namun mereka diikuti sertakan dalam pemerinthan, misalnya Soemitro Djojohadikoesoemo. Berdasarkan inilah Soeharto berhasil menyerap kekuatan-kekuatan lawan untuk kemudian berkembang menjadi kekuatan dirinya sendiri.

Konsep politik asas tunggal yang dicanangkan

oleh Presiden Soeharto, dalam sudut pandang tradisional politik Jawa dapat dianggap hampir sama dengan cara-cara Soekarno dalam mensukseskan konsep politik NASAKON. Ditempatkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat telah menjadikan kekuatan-kekuatan politik atau aliran-aliran politik yang beraneka ragam ideologinya bersatu dan terpusat dalam diri Presiden Soeharto dan sekaligus menempatkan dirinya sebagai pusat kekuasaan dan menempati hierarchi tertinggi dalam sistem politik Orde Baru.

Pratanda lain adanya pemusatan kekuasaan menurut faham tradisional Jawa adalah kesuburan, kemuliaan dan stabilitas. Dalam konteks ini pratanda itu dikongkritkan dengan dua gagasan pokok, yaitu kreatifitas (kesuburan dan kemakmuran) dan keselarasan serta keamanan (tata tentrem kerto raharjo). Sebaliknya tanda-tanda yang melemahkan ketaatan kekuasaan seseorang penguasa dapat dilihat dalam perwujudan adanya kekacauan alam (natural disharmony) seperti : banjir, letusan gunung berapi, wabah penyakit serta adanya perilaku sosial yang tidak pantas seperti pembunuhan korupsi, dan turunnya moralitas masyarakat. Contoh kongkrit yang sampai sekarang dipercaya juga oleh masyarakat Jawa adalah melemahnya kekuasaan Presiden Soekarno yang ditandai oleh kekacauan-kekacauan alam dan sosial yang memuncak pada tragedi nasional G. 30. S PKI. Dalam hal ini orang Jawa percaya bahwa seandainya penguasa itu masih memiliki kekuasaan, kekacauan-kekacauan tersebut tidak akan pernah terjadi. Singkatnya kekacauan-kekacauan tersebut terjadi bukan karena kondisi-kondisi sosial-ekonomi, melainkan karena kekuasaan dalam negara telah menjadi kendor.

IV. PENUTUP.

Dari beberapa fenomena tersebut di atas dapat dikatakan bahwa sedikit banyak proses kultural politik kehidupan sosial politik Indonesia sedikit banyak telah dipengaruhi oleh sebuah konsep sistem politik dan kekuasaan Jawa. Apalagi dari konteks pelaksanaan pembangunan sekarang ini yang selalu berorientasi ke pusat dan adanya budaya "mohon

petunjuk" sebelum suatu program dilaksanakan telah membuktikan bahwa kehidupan sosial politik Indonesia sedikit banyak telah dirasuki oleh sistem politik dan kekuasaan tradisional Jawa.

Yogyakarta, maret 1991

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Fuchry, 1986, Refleksi Faham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia modern. Jakarta, PT. Grsmidia.
- Anderson, Benedict, R. O. G. "the Idea of Power in Javanese Cukture" dalam Holt, Claire (ed), 1972, Culture and Politics in Indonesia. Ithaca : Cornell University Press,
- Budiardjo, Miriam, 1983, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, Jakarta : Penerbit Sinar Harapan.
- Moertono, Soemarsaid, 1963. State and Statecraft in Old Java. Ithaca. N. Y. : Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University.
- Nagel, Jack, H., 1975, The Descriptive Analysis of Power, New Haven : Yale University Press.
- Verba, Sidney and Pye, Lucien, 1966. Political Culture and Political Development, Princeton, N. Y. : Princeton University Press.

-----><-----

Manusia memakan apa saja secara serakah, namun bagaimanapun waktu akan memakannya.